

**PRAGMATISME POLITIK PARTAI ISLAM MENJELANG PEMILU 2024  
(STUDI KASUS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)**

**M. Nofrizal Amir<sup>1</sup>, Fauji Ilyas<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Email Korespondensi: nofrizalikom@gmail.com

**ABSTRACT**

Indonesia is one of the countries with the largest Muslim population in the world. The number of Muslims in Indonesia is recorded at 86.93 percent. This figure indicates that Islam has become the majority religion in Indonesia. However, the tendency of the majority Muslim population in Indonesia does not tend to vote for Islamic parties in political contests. This study aims to examine how Islamic parties can maintain their votes amidst the increasing electability of nationalist-secular parties in Indonesia. This study uses the QDAS approach to analyze news texts using Nvivo Plus 12 software. The results of this study found that Islamic parties such as the Prosperous Justice Party (PKS), the United Development Party (PBB), and the United Development Party (PPP) tend to use the paradigm of political pragmatism to increase their electability and maintain their position in the legislature.

**Keywords:** Islam, Politics, Pragmatism, PKS.

**ABSTRAK**

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang memeluk agama Islam terbesar di dunia. Tercatat jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia sebesar 86,93 persen. Angka seperti itu telah menandakan bahwa Islam telah menjadi agama mayoritas di Indonesia. Meski demikian, kecenderungan minat masyarakat yang mayoritasnya muslim di Indonesia tidak memiliki kecenderungan untuk memilih partai islam dalam kontestasi politik. Penelitian ini cenderung melihat bagaimana partai islam dapat mempertahankan suaranya di tengah meningkatnya elektabilitas partai nasionalis-sekuler di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan QDAS untuk menganalisis teks berita dengan menggunakan perangkat lunak Nvivo Plus 12. Hasil penelitian ini menemukan bahwa partai islam seperti PKS, PBB, dan PPP cenderung menggunakan paradigma pragmatisme politik untuk meningkatkan elektabilitas partai dan mempertahankan posisinya di legislatif.

**Kata kunci:** Islam, Politik, Pragmatisme, PKS.

**PENDAHULUAN**

Menjelang pemilihan umum (Pemilu) pada 2024 mendatang, euforia partai politik di Indonesia sudah mulai terlihat, kesibukan dalam membangun koalisi antar partai dan proses penjurangan bakal calon presiden menjadi wacana yang dipertontonkan di hadapan publik saat ini (Prasojo et al., 2021).

Secara keseluruhan, Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar yang mencapai 86,93% dari angka keseluruhan penduduk (Kusnandar, 2021), banyaknya populasi yang menganut agama Islam menjadikan Islam sendiri menjadi agama yang mayoritas diyakini oleh sebagian besar rakyat Indonesia (Colbran, 2010). Namun, narasi maupun fakta tentang keberadaan mayoritas penduduk Islam di Indonesia tidak serta merta menjadikan partai politik yang berideologi Islam menjadi saluran politik bagi kalangan umat Islam. melalui beberapa fakta dalam sejarah perpolitikan Indonesia kebanyakan kekuasaan pemerintahan selalu berpihak pada keterpilihan partai nasionalis maupun sekuler (Prihatini, 2019).

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

326

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



Dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh (Mohamad Latief, 2015), politik Islam di Indonesia belum menunjukkan perkembangan yang signifikan terhadap implementasi nilai-nilai Islam, kecenderungan pemahaman Islam yang masih terkontaminasi terhadap kondisi sosio-historis masih menyisahkan cacat pada paradigma politik Islam di Indonesia. Cacat ini secara ringkas memberikan bukti atas komitmen substantif yang dipertanyakan terhadap nilai-nilai politik Islam secara keseluruhan; yang mengungkapkan pemisahan yang disepakati antara negara dan agama; yang sekularisme.

Jika ditarik kebelakang, catatan sejarah politik Indonesia telah membuktikan, bahwa ada beberapa faktor yang mendorong berdirinya partai islam. Dalam penelitian (Harahap, 2019) menjelaskan, bahwa ada enam faktor yang mendorong berdirinya partai Islam di Asia Tenggara termaksud Indonesia. Faktor tersebut adalah faktor demografi, sistem politik, ideologi politik, penularan, ekonomi politik internasional, dan persaingan politik.

Namun kemunculan partai Islam juga disertai dengan masalah yang tengah dihadapi, yaitu terbelahnya identitas budaya lokal yang diikuti dengan situasi kurang kondusif bagi partai Islam, ideologi politik dan kualitas partai Islam itu sendiri. Perbedaan pemahaman terhadap interpretasi nilai Islam telah membuat partai Islam di Indonesia sangat sulit untuk bersatu. Masalah utama dalam kehidupan politik di Indonesia adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya kasus korupsi yang menimpa para politisi.

Jika berkaca pada beberapa partai Islam di negara-negara lainnya, seperti partai Hamas di Palestina, dapat diketahui bahwa gerakan politik partai tersebut cenderung menggambarkan tindakan yang cenderung eksklusif dan tidak berkompromi terhadap kependudukan Israel di Palestina, berbeda dengan partai lainnya seperti Fatah, Partai Hamas cenderung memilih gerakan bersenjata sebagai solusi untuk mengatasi krisis di Palestina, Inilah yang membuat masalah Palestina menjadi rumit, terutama ketika Hamas memutuskan untuk menjalankan sistem demokrasi di satu sisi, dan menolak solusi politik damai di sisi lain (Hannase, 2020).

Kuatnya landasan sosio-historis pada sistem politik di Indonesia cenderung memaksakan partai politik Islam mulai bergeser dari prinsip implementasi nilai Islam menjadi sekedar perebutan kekuasaan (Hadiz, 2011). Menariknya jika dilihat lebih kebelakang lagi, beberapa partai Islam seperti Masyumi yang merupakan partai Islam terbesar di masa Orde Lama cenderung mendahulukan aspek pengimplementasian nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Fealy & Platzdasch, 1970). Setelah masa orde baru, partai Masyumi yang diproyeksi akan tumbuh subur setelah terlepas dari orde lama malah cenderung mengalami hambatan yang berarti, yakni di bubarkan (). Menurut (Hadiz, 2011) eksklusifisme partai Islam menjelang pasca orde baru justru merupakan produk otoritarianisme di masa orde baru Soeharto di Indonesia.

Berbeda dengan masa-masa yang lampau, partai islam pasca reformasi banyak mengalami kemerosotan dari aspek jumlah pemilih (Yani, 2023). Partai Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) cenderung berada pada posisi di bawah jika dibandingkan dengan partai nasionalis sekuler di Indonesia. Padahal pada masa kejayaan Masyumi dulu sebagai interpretasi umat islam bisa mendapatkan citra sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan (Siregar, 2013).

Fakta yang menarik yang dapat dijumpai saat ini adalah mengenai dengan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai islam yang besar pada masa akhir orde baru yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. PPP adalah partai yang lahir dari penggabungan 4 partai keagamaan pada tahun 1973. Empat partai tersebut adalah Partai Nahdatul Ulama, Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Serikat Islam Indonesia dan Partai Muslim Indonesia. Pada pemilihan umum tahun 1999, PPP berhasil meraup 12,55% perolehan kursi DPR RI. Tahun 2004 perolehan suara cenderung menurun menjadi 10,55%, pada tahun berikutnya dalam satu masa periode tepatnya di tahun 2009 angka perolehan suara PPP terus menurun menjadi 6,79%. Perolehan kursi mendapatkan peningkatan pada tahun 2014 sebesar 6,96 %, sementara di tahun 2019 PPP hanya memperoleh 3,3 % suara dari perolehan kursi DPR

(Kusnandar, 2022b).

Fakta yang berbeda justru berada di PKS, sebagai partai Islam. PKS terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sekalipun tidak secepat partai-partai nasionalis sekuler lainnya. Namun perkembangan PKS tergolong signifikan. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan perolehan suara dari PKS, di tahun 1999 PKS hanya memperoleh suara sebesar 1,36%, di tahun 2004 PKS mampu mendulang hingga di posisi perolehan suara yang tinggi, yakni 7,34% di tahun 2009, kenaikan perolehan suara pun masih berlangsung, kali ini PKS memperoleh 7,89% perolehan suara, di tahun 2014 perolehan suara partai mengalami penurunan mencapai 6,77%, namun ditahun 2019 perolehan suara PKS kembali tinggi yakni mencapai 8,21%. Mendulangnya perolehan suara dari PKS ini tentu tak terlepas dari sikap maupun strategi pemenangan yang diterapkan oleh partai (Kusnandar, 2022).

Menurut penelitian (Rusli et al., 2021), yang mencoba mencermati strategi kemenangan PKS dalam menduduki kekuasaan politik daerah selama 12 tahun di Sumatera Barat, menjelaskan bahwa pencapaian PKS di Sumatra Barat ini dilakukan karena adanya pendekatan dengan masyarakat melalui cara memadukan konsep keagamaan atau nilai-nilai syari'ah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut juga didukung dengan adanya keselarasan ideologi dan kultur masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Kemudian, untuk memperoleh kepercayaan masyarakat PKS selalu menonjolkan nilai-nilai keagamaan secara konsisten.

Perolehan suara PKS yang terus mendulang hingga pada puncaknya di tahun 2019 adalah sebuah capaian dari strategi politik PKS. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi & Budiarto (2020) dapat disimpulkan, bahwa perolehan suara yang tinggi dari PKS pada tahun 2019 itu tidak terlepas dari poitik branding melalui tagar #2019GantiPresiden yang berkontribusi dalam meningkatkan elektabilitas PKS di ranah media sosial. Hal demikian berakibat pada naiknya perolehan suara PKS pada pemilu legislatif tahun 2019 lalu.s

Penelitian ini akan mengkaji tentang orientasi atau strategi Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia menjelang pemilu tahun 2024 mendatang, pemetaan tentang strategi maupun manuver politik PKS akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat menganalisis kecenderungan strategi atau posisi PKS dalam konstestasi pemilu 2024 nanti

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Qualitative Data Analysis Software (QDAS) untuk menganalisis teks berita dengan menggunakan perangkat lunak Nvivo Plus 12. Penggunaan metode ini dipilih karena beberapa alasan, pertama karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan strategi partai keadilan sejahtera dalam pemilu 2024. Kedua karena pengumpulan data pada penelitian ini hanya melalui analisis pada teks berita yang telah dipublikasikan oleh media nasional yang bereputasi. Ketiga karena penelitian studi kasus dapat menelusuri secara sistematis fakta dan karakteristik objek masalah yang diteliti secara mendalam terkait strategi partai keadilan sejahtera dalam pemilu 2024. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Ncapture pada beberapa sumber di media online sebagai data primer, selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran scopus dengan kata kunci "Partai islam" sebagai data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan sebanyak 50 berita pada media online yang termasuk dalam kualifikasi media online terbaik versi alexa.com, yakni Tempo.co, Kompas.com, dan Detik.com.

Pola analisis data pada penelitian ini yaitu melalui import data berita yang telah di Ncapture untuk dimasukkan pada file yang telah dibuat pada tools NVivo 12 Plus. Selanjutnya data yang telah diambil diolah dan dianalisis.

**Tabel 1: Daftar Media**

Nama Berita	Jumlah Berita
Tempo.com	6
Detik.com	21
Kompas.com	8
Suara.com	7
CNNIndonesia.com	8
<b>Total</b>	<b>50</b>

Analisis data dilakukan melalui import data berita media online yang telah di salin melalui Ncapture sebagai tools yang terkoneksi dengan NVivo 12 Plus untuk proses pengumpulan data. Selanjutnya data yang diambil akan dianalisis melalui Nvivo 12 Plus. Pada data sekunder, pola pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan mendownload sejumlah database di scopus dengan kata kunci “Partai islam” dengan pilihan fitur *All open access*, dengan rentang tahun dari 2018 sampai 2022, fitur *subjek area* adalah *social sciences, document type article, source type journal* dan *language english*.

## PEMBAHASAN

### Orientasi Pragmatisme Partai Islam

Pragmatisme cenderung menjadi teori pokok yang dipakai dalam penelitian ini. Kata pragmatisme pada asalnya terbagi atas dua unsur kata yakni ‘Pragma’ yang berarti tindakan, sementara ‘isme’ yang berarti ajaran atau paham (Al-madinatuddiniyah et al., 2012). Jika digabungkan maka pragmatisme adalah sebuah istilah yang menunjukkan paham tentang sebuah kebenaran yang diukur dari penerapannya dalam bentuk tindakan yang bermanfaat bagi individu maupun kelompok (Kaushik & Walsh, 2019). Pragmatisme selalu memandang bahwa kriteria kebenaran suatu tindakan selalu diukur dari manfaat yang didapatkan oleh orang yang melakukan tindakan tersebut.

Pragmatisme dalam aspek politik sendiri dapat di defenisikan sebagai sebuah tindakan yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi kepentingan pemenuhan kebutuhan aktor maupun kelompok dalam lingkup politik (Collins, 2019). Namun, pragmatisme politik sendiri dapat melemahkan fondasi persatuan maupun aktualisasi ideologi pada suatu kelompok maupun individu. Kasus seperti dapat dicontohkan seperti pada penelitian (Law, 2021) yang menjelaskan bagaimana pengaruh negatif pragmatisme politik dapat melemahkan fondasi persatuan kalangan buruh atau pramugari kapal uap yang bekerja di perairan Tiongkok.

Contoh atas makna pragmatisme yang lain juga dapat disamakan dengan penelitian dari (Lacroix, 2019) tentang gerakan Salafi di Mesir. Menurut penelitian tersebut, gerakan Salafi saat ini cenderung menggambarkan bahwa dinamika sektarianisme di Mesir sudah bersifat lebih mencair dan terkadang kontradiktif dengan wajah Salafi yang sebelumnya. Selama lima tahun terakhir, Partai yang diusung oleh kaum salafi telah mengambil pendekatan politik yang cenderung pragmatis dan fleksibel. Namun, sikap seperti itu tidak menjadikan mereka melepaskan pendirian agamanya yang keras. Hal demikian dilakukan untuk melindungi kepentingan dakwah dan mempertahankan posisi mereka di tengah masyarakat.

Pragmatisme memiliki pengaruh sangat penting dalam merubah strategi politik suatu partai. Dalam penelitian (Hannase, 2020) tentang orientasi Hamas dalam kancah politik di Palestina menjelaskan bahwa, dalam prespektif ideologis, konflik kekerasan yang cenderung melibatkan kelompok islamis cenderung disebabkan karena kuatnya doktrin teologis yang dianut melalui intepretasi keagamaannya. Sementara dalam dunia politik, gerakan islamis cenderung tidak konsisten maupun tidak ideologis, hal demikian disebabkan karena perilaku politik Hamas sendiri cenderung diadaptasi dengan kondisi politik yang terjadi. Selain itu Hamas juga berperilaku sama dengan partai politik lainnya dari berbagai macam latar belakang ideologis.

Penelitian ini cenderung memaknai pragmatisme partai islam sebagai strategi yang diterapkan oleh

partai islam untuk merawat eksistensi partainya dan juga untuk menarik minat masyarakat untuk memilih partai tersebut. Meski demikian, prinsip dan keyakinan terhadap agama masih menjadi nilai yang dipegang oleh tiap anggota maupun partai, namun untuk melakoni praktik politik dalam sistem demokrasi maka partai islam harus berusaha sebisa mungkin untuk beradaptasi, maka strategi politik pragmatis menjadi alternatif terhadap problem yang dihadapi partai islam.

Berbeda dengan pragmatisme politik, orientasi partai yang cenderung inklusif memiliki makna tersendiri. Orientasi politik merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok dalam interaksinya dalam dunia politik. Hal tersebut terdiri dari pengetahuan, sikap, nilai dan perilaku politik terhadap suatu partai politik, ideologi politik, maupun sistem politik yang berlaku.

Pada penelitian sebelumnya, (Fahmi et al., 2019) cenderung menempatkan orientasi politik partai islam dalam nuansa inklusif maupun eksklusif untuk mempengaruhi keinginan dan sikap masyarakat terhadap arah politiknya. Istilah inklusif maupun eksklusif dalam menjabarkan orientasi politik dipilih dengan pertimbangan bahwa yang menjadi akar perdebatan umat islam di indonesia adalah perdebatan tentang menerima ataupun menolak ide, pendapat, atau gagasan baru diluar konteks keagamaan islam. sikap inklusif partai islam digambarkan sebagai keyakinan yang menerima segala ide, hal tersebut juga dipengaruhi oleh sikap pada keyakinan secara substansif keyakinan tersebut akan dijadikan pegangan dalam keputusan politik. Sementara sikap eksklusif sebagai upaya untuk tetap mempertahankan kemurnian islam yang disakralkan dan bersifat kaku.

Terkait inklusifitas, menurut penelitian (Hairul & Ismail, 2021) tentang gagasan religiusitas Husein Fadlullah mengenai makna inklusifitas dalam prespektif penafsiran al-Qur'an bahwa, makna inklusifitas dapat dimaknai sebagai sikap keislaman yang mampu menghargai keberagaman. Penafsiran Fadlullah menunjukkan bahwa dia memegang prinsip moderat dalam beragama. Hal demikian terbukti dari keyakinan serta gagasannya tentang kebebasan beragama, semangat persatuan umat beragama dan memproyeksikan dialog antar umat beragama.

Konsepsi yang lebih krusial terhadap penyimpangan partai islam atas landasan ideologi partainya adalah *post islamism*, istilah tersebut melekat pada pergeseran paradigma politik partai islam. hal tersebut terjadi karena menurunnya minat masyarakat dalam memilih partai islam. Penelitian (Othman & Boyman, 2018) menggambarkan bahwa pemikiran sekuler dan liberal sangat banyak dijumpai dalam post-islamism, hal demikian cenderung selaras dengan yang disampaikan oleh banyak kritikus islamisme. Post-islamisme juga bisa dijumpai pada model politik turki yang banyaknya mengusungkan sekularisme dan liberalisme. Karena itu, dalam penelitian tersebut menegaskan bahwa model politik Turki adalah model politik sekuler.

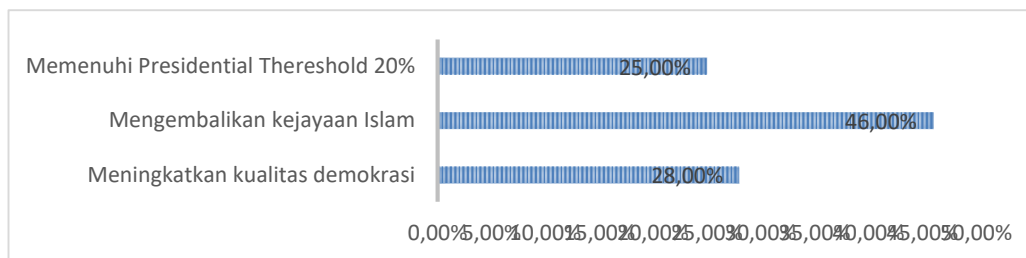
Perbedaan antara konsep orientasi partai islam yang cenderung pada inklusifitas partai islam adalah dimana inklusifitas dapat dimaknai sebagai pilihan terhadap paradigma atau haluan politik partai islam yang secara internal menggambarkan keterbukaan terhadap beragam keyakinan maupun pemikiran politik. Sikap terbuka seperti demikian bisa saja dipengaruhi karena minat pemilih di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama islam sudah tidak lagi tertarik pada partai islam. paradigma yang tertanam secara internal terlihat memiliki keselarasan terhadap sikap politik secara eksternal. Sementara pragmatisme cenderung sebaliknya, dimana ada kontradiksi antara sikap internal dan eksternal partai.

## Pragmatisme Politik dan Inkonsistensi Partai Keadilan Sejahtera

Pada tanggal 14 April 2021 lalu, PPP dan PKS yang sama-sama adalah partai yang berasaskan Islam sempat melangsungkan pertemuan di kantor DPP PKS. Pertemuan tersebut lantas menghasilkan gagasan tentang pembentukan poros partai islam. Gagasan tersebut disambut baik oleh beberapa partai, utamanya Partai Bulan Bintang (PBB). Ketua umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menilai partai islam bisa saja tampil dengan satu partai koalisi dalam pemilu, hal tersebut karena PBB selalu menyambut baik setiap gagasan untuk menyatukan partai islam, baik dalam bentuk koalisi, aliansi, bahkan peleburan partai-partai islam menjadi satu kekuatan. Gagasan ini cenderung didukung oleh beberapa petinggi partai Islam, namun masih ada beberapa partai Islam yang merasa skeptis dengan motivasi terbentuknya poros partai islam menjelang

pemilu tahun 2024.

**Gambar 1: Matrix Coding, Nvivo 12 plus  
Presentase jumlah dan alasan pro terhadap poros partai Islam**



Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

Berdasarkan gambar 1 di atas, ada tiga alasan yang menjadi dukungan terhadap pembentukan poros partai islam. yang pertama berkaitan dengan sistem presidential threshold sebesar 20 persen, dimana partai dengan perolehan suara di legislatif harus mencukupi 20 persen perolehan suara agar dapat mencukupi ambang batas pencalonan presiden.

Pembentukan koalisi partai islam ini juga didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebagai partai yang berasaskan pancasila, namun PKB sangat lekat pada pemilih islam karena nilai partainya. Menurut PKB, PKS dapat memperluas kualisi yang tidak hanya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun bisa ditambah dengan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden alias presidential threshold sebesar 20 persen. Ada dua keuntungan jika poros partai islam kemudian terbentuk, pertama adalah mensolidkan peran politik umat islam, dan yang kedua adalah poros partai islam sebagai poros yang baru dapat menjadi *think thank* pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Selain sebagai upaya untuk mengembalikan kejayaan umat islam di masa lalu, poros partai islam juga diyakini bisa membangun poros kekuatan demokrasi di indonesia. Upaya ini dapat digambarkan lewat penawaran ide dan berbagai program keumatan yang akan ditawarkan oleh partai islam. Namun, ditengah maraknya geliat membentuk poros yang di isi oleh partai – partai islam, beberapa partai islam juga terlihat tidak menyetujui adanya poros partai islam.

Gagasan pembentukan poros partai islam yang mulai muncul menjelang pemilihan presiden 2024 tentu tak berjalan mulus, beberapa partai islam turut mengkritisi dengan sikap yang skeptis. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Jendral Partai Gelora; Mahfudz Siddiq, bahwa jika pembentukan koalisi partai islam hanya sebatas untuk pemilihan presiden, maka hal itu dinilai terlalu pragmatis.

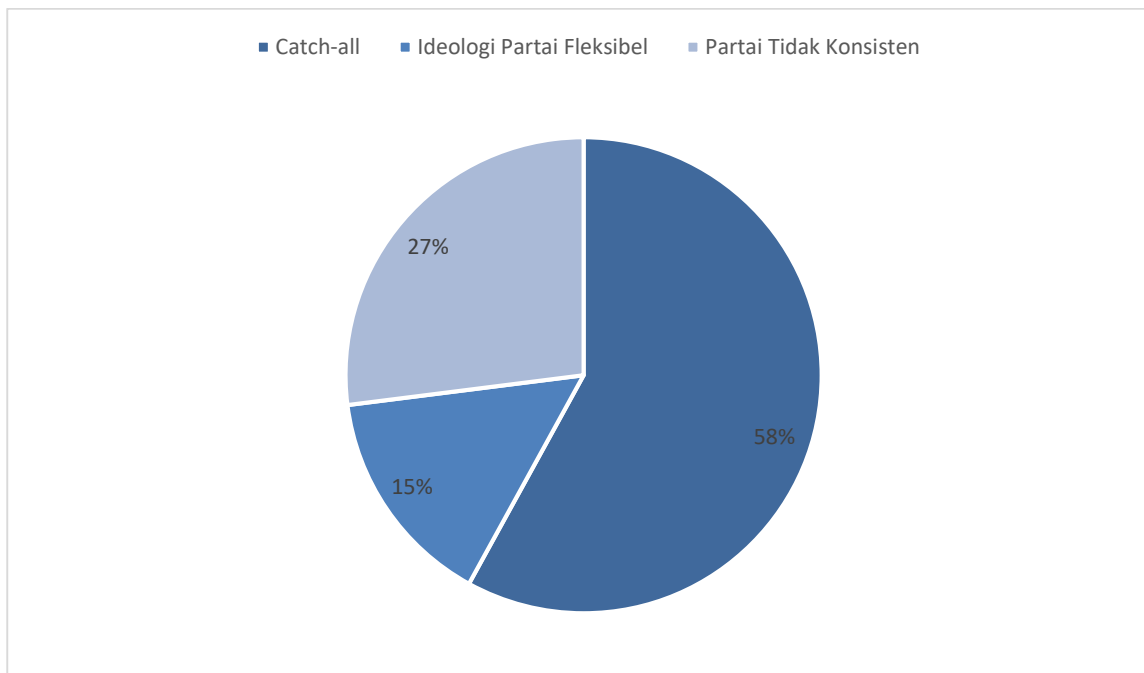
Tak hanya itu, Partai Ummat yang juga diketahui merupakan partai yang baru dengan latar belakang sebagai partai islam juga menaruh kecurigaan yang besar. Partai Ummat sebagai salah satu partai baru menyampaikan bahwa pembentukan poros partai islam oleh partai - partai islam saat ini tak lebih dari sebuah kepanikan dari sebagian partai Islam yang sudah mulai ditinggalkan pendukungnya. Hal tersebut terlihat ketika adanya persoalan islam, beberapa partai yang mengatasnamakan partai islam terkesan diam.

Latar belakang pembentukan kualisi partai islam yang juga mempertimbangkan ketercukupan syarat dalam sistem presidential threshold sebesar 20 persen itu dimaknai bernuansa pragmatis, belum lagi beberapa partai seperti PPP dan PBB yang merupakan partai yang sebelumnya berkualisi dengan pemerintah di era Joko Widodo akan cenderung mempertegas proses kepentingan di mata publik.

Ada beberapa gambaran dari sikap pragmatisme partai Islam utamanya adalah partai PKS. Setelah reformasi bergulir PKS menjadi partai yang cenderung menggambarkan kekuatan ideologis mengusungkan islam sebagai landasan dasar gerakannya. Namun, dari beberapa fakta yang muncul belakangan ini cenderung menunjukkan bahwa terjadi pergeseran paradigma maupun strategi politik PKS

untuk mendulang suara maupun elektabilitas pada pemilu 2024.

**Gambar 2: Matrix Coding, Nvivo 12 plus  
Visualisasi Politik Pragmatisme Partai Keadilan Sejahtera**



Sumber: Disusun oleh Penulis, 2025

### Inkonsistensi Partai

Setelah sempat membangun wacana koalisi partai islam untuk dapat mengembalikan kejayaan islam di Indonesia pada tahun 2021 lalu, PKS melalui juru bicaranya, Pipin Sopian, mengemukakan bahwa PKS sendiri lebih tertarik membangun koalisi partai politik yang mengusung partai nasionalis-religius dibandingkan dengan parpol islam. koalisi partai islam menurut PKS hanya akan menghadirkan peluang politik identitas (Nugraheny, 2022).

PKS sebelumnya pernah mengajukan permohonan dan mendukung Judicial review Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut karena penerapan syarat pencalonan presiden yang mengharuskan diusung oleh partai-partai yang memperoleh suara 20 persen di parlemen cenderung menghambat proses kemunculan lebih banyaknya calon alternatif dari kepemimpinan nasional. Selain itu sistem Presidential Threshold ini juga akan membatasi koalisi partai yang harusnya dibangun secara leluasa. Seperti yang terlihat pada gambar 2 di atas, selain memperjuangkan penolakannya pada sistem Presidential Threshold, PKS juga berusaha membangun komunikasi yang memungkinkan koalisi secara terbuka, di sinilah terlihat bahwa ada inkonsistensi dari PKS yang awalnya ingin membangun poros partai islam dan akhirnya memilih untuk menolak Presidential Threshold, namun disisi lain cenderung membangun koalisi secara intens dengan partai yang memiliki kecenderungan yang berbeda dengan PKS.

### Catch-all Party

Catch-all party adalah gambaran paradigma dan strategi partai yang lebih inklusif, berbeda dengan narasi keterbukaan kelembagaan partai lainnya, penggunaan kata Catch-all party cenderung menggambarkan pragmatisme partai yang suka memanfaatkan setiap kesempatan seperti yang dikatakan oleh (Aminuddin & Ramadlan, 2015) bahwa dalam realitas politik Indonesia saat ini ideologi partai menjadi hal yang kurang begitu penting untuk dipakai dalam menggalang kekuatan masa atau menarik

simpati pemilih.

Menjelang pemilu 2024, PKS mengakui bahwa mereka intens membangun komunikasi dengan semua pihak, salah satunya adalah partai Nasdem dan Demokrat dalam membangun koalisi pemilu 2024. Meski demikian, Sekertaris Jendral DPP PKS sendiri mengaku bahwa tidak membatasi diri pada Nasdem dan Demokrat saja. PKS menganggap siapapun bisa mengajak mereka berkualisi.

Sebelumnya hubungan PKS dan PKB terlihat sangat akrab. Hal tersebut karena PKS pernah mencoba menggandeng PKB agar membentuk koalisi pada pemilu 2024 nanti. Menurut PKS, koalisi yang dibangun dengan PKB akan cenderung terbuka, PKS menilai bahwa tiga partai (Golkar, PAN, PPP) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) juga bisa bergabung dan bahkan PDI Perjuangan dengan partai yang berbasis nasionalis-sekuler. PKS juga menegaskan bahwa mereka juga mempunyai kemungkinan untuk bergabung dengan partai Gerindra. Walaupun dalam rekam jejaknya PKS sendiri pernah berseteru dengan partai Gerindra soal pengusungan Wakil Gubernur DKI Jakarta, namun PKS tetap membuka diri bagi partai Gerindra.

Sikap PKS yang cenderung membuka diri terhadap semua partai untuk berkualisi cenderung ditafsirkan menjadi sikap yang pragmatis, hal tersebut karena adanya kontradiksi dari argumentasi maupun setiap sikap yang ditunjukkan oleh PKS sendiri, kemungkinan untuk membuka koalisi dengan partai lain juga akan cenderung mengikis landasan aktualisasi nilai yang diyakini dalam tubuh PKS.

## Flexibility Ideological

Fleksibilitas Ideologi cenderung ditafsirkan sebagai prinsip dasar yang diterapkan dalam internal PKS. Sebagai partai yang berasaskan islam PKS terkesan mengambil langkah pragmatis dengan memilih Evalina Heryanti yang merupakan perempuan pemeluk agama nasrani untuk menduduki jabatan dewan pakar PKS. Hal demikian tentu menjadi ukuran dimana PKS sendiri ingin membranding dirinya untuk dapat terlihat inklusif di mata publik. Namun kata wakil ketua dewan pembina PSI, Grace Natalie, ukuran partai yang memiliki paradigma yang inklusif tidak hanya diukur melalui penunjukan seseorang dari non muslim untuk masuk dalam struktur PKS, namun harus juga ditunjukkan berupa sikap dimana PKS juga harus mendukung UU berbasis kemanusiaan seperti Undang – undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sebelumnya sempat ditolak oleh PKS.

Penolakan PKS terhadap RUU TPKS disebabkan karena PKS menilai RUU TPKS belum terlalu komprehensif memasukan seluruh tindakan keusilaan mulai dari perzinaan hingga penyimpangan seksual. Selain menolak RUU TPKS penolakan PKS juga berlangsung setelah munculnya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Penolakan PKS ini disebabkan karena adanya beberapa pasal yang menurut PKS turut melegalkan kebebasan seksual, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa PKS anti terhadap kekerasan seksual namun tidak mentolelir kebebasan seksual.

## KESIMPULAN

Rendahny pilihan politik masyarakat Indonesia yang mayoritasnya memeluk agama islam terhadap partai islam khususnya PKS telah menjadi pelajaran tersendiri untuk PKS. Saat ini beberapa fakta dari temuan penelitian ini menggambarkan bahwa partai PKS sendiri sudah memiliki kecenderungan yang lebih pragmatis. Hal tersebut karena partai PKS sendiri secara internal masih berpegang teguh para asas dan prinsip islam namun berusaha terlihat inklusif di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Hal demikian telah memaksakan partai menjadi lebih pragmatis dengan menangkap semua kesempatan (*Catch-All*) lebih fleksibel dalam aktualisasi ideologi dan juga sering tidak konsisten dengan keputusan partai.

## REFERENSI

- Al-madinatuddiniyah, D. I. D. T., Cot, S., & Kecamatan, M. (2012). ISLAM DAN HUMANISME MENURUT SEYYED HOSSEIN NASR. 1, 1–72.
- Aminuddin, M. F., & Ramadlan, M. F. S. (2015). Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009. *Jurnal Politik*, 1(1), 35. <https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.9>
- Colbran, N. (2010). Realities and challenges in realising freedom of religion or belief in Indonesia. *International Journal of Human Rights*, 14(5), 678–704. <https://doi.org/10.1080/13642980903155166>
- Collins, P. H. (2019). The Palgrave Handbook of Intersectionality in Public Policy. *The Palgrave Handbook of Intersectionality in Public Policy*, 167–192. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-98473-5>
- Fahmi, I., Takwin, B., & Muhamad, R. (2019). Nilai Moral sebagai Prediktor Orientasi Politik pada Anggota Organisasi Keagamaan. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(2), 165–180. <https://doi.org/10.15575/psy.v6i2.6260>
- Fealy, G., & Plattdasch, B. (1970). The Masyumi Legacy: Between Islamist Idealism and Political Exigency. In *Studia Islamika* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/10.15408/sdi.v12i1.646>
- Hadiz, V. R. (2011). Indonesian Political Islam: Capitalist Development and the Legacies of the Cold War. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 30(1), 3–38. <https://doi.org/10.1177/186810341103000101>
- Hairul, M. A., & Ismail, T. (2021). Inklusivitas Tafsir Min Wahyi Al-Qur'an. *Jurnal Al-Wajid*, 2(2), 426–448.
- Hannase, M. (2020). The Dilemma Between Religious Doctrine and Political Pragmatism: Study of Hamas in Palestine. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 10(1), 54–70. <https://doi.org/10.15642/religio.v10i1.1308>
- Harahap, H. I. (2019). Islamic political parties in southeast asia: The origin and political problems. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(5), 481–489. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7555>
- Kaushik, V., & Walsh, C. A. (2019). Pragmatism as a research paradigm and its implications for Social Work research. *Social Sciences*, 8(9). <https://doi.org/10.3390/socsci8090255>
- Kusnandar, V. B. (2021). Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021. *Databoks.Id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021#:~:text=Terdapat 238%2C09 juta jiwa,beragama Islam pada akhir 2021.>
- Kusnandar, V. B. (2022a). Ini Perolehan Suara PKS dalam Pemilu 1999-2019. *Databoks.Id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/17/ini-perolehan-suara-pks-dalam-pemilu-1999-2019>
- Kusnandar, V. B. (2022b). Perolehan Kursi DPR RI Partai Persatuan Pembangunan Semakin Menurun Sejak Pemilu 1999. *Databoks.Id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/perolehan-kursi-dpr-ri-partai-persatuan-pembangunan-semakin-menurun-sejak-pemilu-1999>
- Lacroix, S. (2019). Sectarianism and political pragmatism: The paradox of Egypt's al-nour salafis. In *Beyond Sunni and Shia: The Roots of Sectarianism in a Changing Middle East* (pp. 265–282). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190876050.003.0012>
- Law, P. K.-F. (2021). The political pragmatism of steamship “teaboys”: Reassessing the Chinese labor movement, 1927–1934. *Twentieth-Century China*, 46(3), 287–308. <https://doi.org/10.1353/tcc.2021.0025>
- Mohamad Latief, M. J. J. (2015). Islam, state and secularism; analysis on the substantive political paradigm in indonesia. *International Journal of Islamic and Civilizational Studies ISLAM*, 1(2016), 28–36.
- Nugraheny, D. E. (2022). PKS Lebih Ingin Bangun Koalisi Nasionalis-Religius daripada Gandeng Partai Islam. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/14/18194331/pks-lebih-ingin->

bangun-koalisi-nasionalis-religius-daripada-gandeng-partai

- Othman, M. A., & Boyman, S. N. (2018). Political Islam in Islamism and Post Islamism: A Study on Islamic Renaissance Front (IRF). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i1/3840>
- Prasojo, M., Prakoso, L. Y., Mansyah, A., Hendra, A., & Bangun, E. (2021). Pancasila as the Foundation of Political Ethics in Indonesia, Case Study of the Struggle for the Chairman of a Political Party in Indonesia. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(2). <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.280>
- Prihatini, E. S. (2019). Islam, Parties, and Women's Political Nomination in Indonesia. *Politics and Gender*, 1–23. <https://doi.org/10.1017/S1743923X19000321>
- Rachmadi, R., & Budianto, H. (2020). Political Branding Tagar #2019gantipresiden Dalam Meningkatkan Elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera Di Ranah Media Sosial. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(11), 1099–1112. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i11.17057>
- Rusli, R., Desmaniar, D., Azmi, N. A., & Fathani, A. T. (2021). Analisis Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat (2009-2020). *Jurnal Tapis*, 17(1), 69–83.
- Siregar, I. F. (2013). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960). *Thaqāfiyyāt*, 14(1).
- Yani, A. (2023). Transformation of Islamic Political Movements in Indonesia in the Reformation Era. *Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS)*, 5(1), 18–33. <https://doi.org/10.62213/0jhbz881>

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

335

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX

